

**BELENGGU TENGKULAK ATAS PETANI PEMBUDIDAYA LELE:  
Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah**

**Iwan Zaenul Fuad, Aenurofik, Ahmad Rosyid**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114  
[pakiwandosenstain@gmail.com](mailto:pakiwandosenstain@gmail.com)

**Abstract:** Within the context of Indonesia as a muslim majority country, Islamic teaching has been widely implemented throughout the country. As a result, Islamic values have become the foundation and basic values within societal economic practices. These values, among others, include social and economic justice and equality. However, these values are not always implemented when people's injustice and greed are in play. One of the cases that can provide example in this case is the relationship between catfish farmers and distributors in Wonotunggal, Batang, Central Java. As a commodity with high economical value, many farmers grow catfish. Thus, there was a big need for catfish distributors to facilitate the rising numbers of catfish farmers, to help them sell the catfish. However, there were many distributors who made attempt to control the market, which give disadvantages to the farmers. One of the examples of such disadvantageous practices is '*ijon*', or lending money to the farmers with high interest. As a result many farmers were trapped into debt. This study aims at exploring the relationship between catfish farmers and distributors in Siwatu Village, Wonotunggal, Batang.

**Keywords:** Distributor, Catfish Farm, Patron-Client Relation

**Abstrak:** Keberadaan ajaran Islam yang sarat akan pesan moral, tidak diperuntukkan bagi sebagian golongan saja, melainkan *rahmatan li al-'alamin* (berlaku universal). Implikasinya, dalam mendistribusikan kesejahteraan-kemakmuran, harus selalu berpijak pada nilai keadilan dan pemerataan. Namun dalam praktiknya, nilai moral luhur ini berhadapan dengan nafsu keserakahan manusia, yang tidak segan melakukan penindasan dalam mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan. Hal ini juga nampak dalam relasi antara petani lele dan tengkulak di Batang, Jawa Tengah. Sebagai komoditas yang punya nilai ekonomis, membuat petani berlomba membudidayakannya. Seiring dengan merebaknya budidaya lele, muncul tengkulak, yang awalnya membantu petani dalam memasarkan budidayanya. Hubungan mulai berkembang dalam pola patron-klien, di mana tengkulak mulai mengendalikan sekaligus menindas petani dengan keunggulan modal dan daya tawar yang dimilikinya. Seringkali ini didahului dengan praktik *ijon* di mana tengkulak memberikan kredit rente yang mengakibatkan petani lele terjebak hutang berlipat. Penelitian ini bertujuan menguak proses terjadinya hubungan patron-klien antara petani dengan tengkulak sekaligus melihat kekuatan daya ikat hubungan ini dalam budidaya lele, khususnya di Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

**Kata Kunci :** *Tengkulak, Budidaya Lele, Relasi Patron-Klien*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

*Homo homini lupus*. Gambaran Thomas Hobbes tentang keserakahan manusia dalam memperebutkan sumberdaya untuk kepentingannya, tampak jelas dalam kehidupan perekonomian liberal yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berusaha. Paradigma liberal seperti ini menggiring pada konsep pasar bebas, di mana hanya pihak yang kuatlah yang akan memenangkan persaingan usaha. Kondisi seperti ini tentunya akan mengakibatkan semakin lebarnya gap kaya-miskin dalam tatanan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian manusia juga dapat digambarkan sebagai *homo homini socius*, di mana manusia adalah kawan atau rekan bagi sesama.

Gambaran keserakahan manusia dalam mendistribusikan kekayaan alam ini tercermin dalam bentuk komersialisasi pertanian yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial sekaligus memunculkan hubungan patron-klien antara petani dengan tengkulak.

Sebagaimana digambarkan Scott, relasi tengkulak-petani ini diawali dari perbedaan antara si kaya dan si miskin yang melakukan hubungan pertukaran barang dan jasa. Petani yang tidak punya terpaksa berhutang pada tengkulak dalam memenuhi kebutuhan produksi pertaniannya, akan terikat pada tengkulak untuk menjual hasil produksinya, demikian juga dalam hal harga jual produksinya. Hal inilah yang menurut Scott (dalam Putra, 1988: 3), merupakan salah satu ciri hubungan patron-klien.

Fenomena patron-klien ini terjadi di hampir seluruh aktifitas produksi pangan, baik dunia pertanian, sampai perikanan (nelayan). Aktivitas perikanan darat (budidaya ikan air tawar) termasuk budidaya lele, diduga tidak terlepas dari adanya relasi patron-klien. Hal ini mengingat petani lele rata-rata tergolong sebagai pihak yang kekayaannya terbatas dan memerlukan bantuan dari si kaya untuk memenuhi kebutuhannya.

Di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang terdapat sejumlah petani yang melakukan aktivitas budidaya lele. Oleh karena itu petani di sini dapat disebut juga sebagai pembudidaya. Pemilihan nomenklatur petani ini, mengingat secara antropologis, mereka menyebut aktivitas yang mereka lakukan adalah pertanian dan mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai petani. mereka menganggap aktivitas budidaya yang mereka lakukan sama dengan aktivitas pertanian pada umumnya. Misalnya dalam pertanian padi, dikenal istilah *nandur* (menanam) dan *ngunduh* (panen). Demikian halnya dalam budidaya lele, mereka juga nandur bibit dan juga memanennya.

Di desa tersebut terdapat sekitar 3.800 m<sup>2</sup> kolam perikanan di pekarangan rumah, yang sebagian besar melakukan budidaya lele. Menurut perhitungan Yusuf Rinjani (wawancara 26 Februari, 2015) (petani, penggagas Kelompok Tani Lele “Karya Mulia”), potensi perikanan lele di Desa Siwatu sangat besar. Dengan kolam seluas itu, desa ini (Siwatu) sanggup menghasilkan lele 2,5 kwintal per harinya. Penulis menduga kemampuan produksi tersebut, tidak dapat dihasilkan petani sendiri tanpa bantuan pihak ketiga (tengkulak). Dan ketika petani menjual hasil pertaniannya pun, tidak mungkin langsung dijual sendiri oleh petani ke pasar. Mengingat adanya kekosongan pihak dalam mata rantai aktivitas produksi dan/hingga konsumsi ini, penulis menduga diisi oleh tengkulak.

Dari paparan di atas, peneliti mencoba melihat ada-tidaknya relasi patron-klien ini dalam komoditas lele antara petani dengan tengkulak di desa tersebut. Selanjutnya, akan dilihat sejauh mana kuasa tengkulak ini mengikat petani. Untuk itu rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, dapat dikerucutkan dalam pertanyaan berikut: *Pertama*, bagaimana proses terjadinya relasi patron-klien dalam budidaya lele? *Kedua*, sejauh mana daya ikat tengkulak dalam menjerat petani lele di desa tersebut?

Penelitian ini mempunyai relevansi antara riset-riset sebelumnya, di antaranya:

- a. Rukib, M. 2009. “Perlawanan Petani Sumenep””. Skripsi Mahasiswa Sosiologi FISH UIN Sunan Kalijogo. Menurutnya perlawanan petani (dalam bentuk demo secara *sporadic*) terjadi karena harga tembakau yang ditentukan sendiri oleh pihak gudang secara sewenang-

wenang dan sulit ditembus oleh petani karena posisi tawar petani yang rendah berbanding dengan pihak gudang yang mempunyai otoritas penuh (kuat).

- b. Kausar dan Zaman, Komar. 2011. "Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke Dan Petani Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)". Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE) Volume 2, Nomor 2, Desember 2011. Dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa hubungan patron-klien terjadi disebabkan beberapa faktor, yakni (1) Ketergantungan dalam hal pemasaran; (2) karena petani butuh modal untuk memproduksi; (3) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, petani berhutang pada toke; dan (4) petani butuh biaya pengobatan dan pendidikan anak.
- c. Purwanto, dkk. 2012. "Keterjeratan Pesanggem Pada Tengkulak di Desa Randualas". KKN NYATA PAR. IAIN Sunan Ampel, yang menjelaskan problem sosial masyarakat utamanya komunitas pesanggem yang mengalami keterpurukan dengan adanya tengkulak serta mengkonfirmasi dengan teori dan temuan data. Teori yang akan dipakai yakni teori ketergantungan dari Andre Gunder Frank, teori tindakan dari Weber, teori Gramsci mengenai hegemoni dilihat dari selang budaya yang ada di Desa Randu Alas yang menyebabkan tindakan kepatuhan dan tidak dapat terlepas dalam proses surplus ekonomi sekaligus mengkonfirmasi dengan teori eksploitasi modal oleh Karl Marx dalam pengeloaan *Baon*. Dalam ketergantungan tersebut menyebabkan para *pesanggem* terjerat dan tidak mudah untuk terlepas dalam sistem permainan modal oleh tengkulak di Daerah Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

## B. Kerangka Teori

### 1. Karakteristik dan Asal Muasal Hubungan Patron-Klien

Scott dalam Putra (1988: 3-4) mengemukakan bahwa hubungan patronase mempunyai tiga karakteristik khusus, yakni : Pertama, adanya ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran; Kedua, adanya tatap muka (*face to face character*); dan ketiga, mempunyai sifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Ketidaksamaan antara patron dengan klien terlihat juga pada hubungan antara petani dengan tengkulak. Ketidaksamaan tersebut tercermin dalam hal kekayaan, kekuasaan dan kedudukannya. Petani sebagai si klien digambarkan sebagai si miskin; dan tengkulak sebagai orang yang mempunyai uang (patron). Kemudian keduanya membuat suatu relasi pertukaran, yakni hutang piutang dan jasa (penyediaan sarana produksi dan pemasaran), hingga menimbulkan keterikatan petani untuk tunduk dan mengikuti keinginan tengkulak. Keterikatan petani ini terjadi karena tengkulak dalam posisi sebagai pemberi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan petani dan keluarganya agar mereka dapat bertahan hidup (*survive*). Rasa wajib membalas jasa pada tengkulak inilah yang menjadikan petani terikat pada sang patron. Keterikatan tersebut akan mampu bertahan selama tengkulak masih dirasakan mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan petani.

Penelitian yang dilakukan oleh Firt memperlihatkan bahwa unsur-unsur ekonomi kapitalis telah mempengaruhi secara meluas terhadap masyarakat petani dan nelayan. Pemilikan alat-alat produksi mayoritas berada di tangan golongan pemilik modal dan sebagian besar petani dan nelayan tidak mempunyai alat-alat produksi. Mereka hanya mengandalkan tenaga saja yang dijual kepada pemilik modal. Dengan kata lain, hubungan antara pemilik modal dengan petani dan nelayan merupakan hubungan buruh majikan (*patron-client*). Lebih lanjut beliau menunjukkan masuknya unsur-unsur ekonomi kapitalis secara bebas yang menyebabkan kehidupan semakin terdesak dan seterusnya mengakibatkan mereka kearah kemiskinan.

Praktek ijon yang dilakukan pedagang/tengkulak hasil pertanian sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Studi investigasi yang pernah dilakukan Babad untuk menganalisis rantai pemasaran produk pertanian di Pasar Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa praktek ijon

pada komoditas buah dan rempah-rempah pertanian lahan kering melibatkan banyak aktor dalam satu mata rantai yang berperan sebagai distributor pinjaman sekaligus pengepul hasil pertanian dengan sistem *multilevel*. Tengkulak kabupaten memiliki “bawahan” beberapa tengkulak kecamatan. Tengkulak kecamatan memiliki beberapa “bawahan” tengkulak desa, begitu seterusnya sampai *level* dusun. Modal yang dipinjamkan sampai dengan petani merupakan milik pemodal besar, sementara tengkulak kecamatan, desa dan dusun hanya mendistribusikan saja. Petani tidak mengetahui pasti uang siapa yang sebenarnya dia pinjam.

Siklus peredaran modal dimulai pada setiap awal musim produksi tiap jenis komoditas, misalnya ketika pohon petai mulai berbunga, maka saat itu pula modal pinjaman dari tengkulak besar digelontorkan. Jika dalam waktu berdekatan terdapat lebih dari satu jenis komoditas yang mulai berbunga, misalnya sedang musim duku, musim melinjo, dan musim pala berbunga, maka volume modal pinjaman yang beredar juga berlipat ganda. Di Kecamatan Somagede saja terdapat setidaknya 5 tengkulak besar yang menyalurkan pinjaman dan menampung pembelian komoditas gula kelapa, kelapa, pala, cengkih, melinjo, petai, duku, jengkol. Dari setiap tengkulak kecamatan memiliki “mitra” beberapa tengkulak di beberapa desa.

Petani meminjam uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang menggejala sampai pelosok pedesaan juga merupakan faktor pendorong maraknya sistem ijon. Dalam beberapa kasus, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang meminjamkan uang dipandang sebagai penolong. Di tingkat desa dan dusun, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi dan patronase. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamarkan dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapatkan uang.

Prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan sangat informal, tidak terikat waktu dan tempat. Hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis. Di Desa Kemawi contohnya, meskipun telah dibentuk Badan Kredit Desa (BKD) atas kerjasama Pemerintah Desa dan BRI Unit Somagede, ternyata petani kurang memanfaatkan keberadaannya untuk memperoleh pinjaman dengan alasan terlalu rumit dan prosedural, walaupun mereka mengetahui hitung-hitungan ekonomisnya akan lebih menguntungkan. Jadi maraknya ijon bukan sekedar derasnya modal yang ingin mengeksploitasi petani, namun juga karena persoalan budaya dan sesat pikir masyarakat.

Tengkulak sebagai kreditor dan pembeli hasil produk pertanian mendapatkan keuntungan berlipat. Keuntungan tersebut didapat dari bunga dari pinjaman yang diberikan, dan keuntungan dari selisih harga beli di petani dengan harga jual di pasar konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tengkulak leluasa membeli harga petani dengan rendah karena posisi tawar yang sangat kuat di hadapan petani. Walaupun harga akan bergerak sesuai tarik ulur permintaan dan penawaran barang, selisih keuntungan akan lebih banyak dinikmati tengkulak/pengepul. Sebaliknya, petani akan dirugikan karena dia terbebani hutang dengan bunga pinjaman tinggi, serta dirugikan untuk mendapat kesempatan memperoleh harga yang layak bagi hasil panennya.

## **2. Petani Masih Bergantung Ke Tengkulak**

Dalam Kajian Sosiologi Pembangunan, Teori Ketergantungan atau Teori Dependensi memiliki beberapa Asumsi Dasar yang dapat dijadikan landasan dalam mengkaji suatu

keadaan ketergantungan, adalah: *Pertama*, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh individu, kelompok, masyarakat bahkan negara;

*Kedua*, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh “faktor luar”. Sebab terpenting yang menghambat pembangunan tidak terletak pada persoalan kekurangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wiraswata, melainkan terletak berada di luar jangkauan politik ekonomi;

*Ketiga*, permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi. Dengan mengalirnya surplus ekonomi dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Ini diperburuk lagi karena negara Dunia Ketiga mengalami kemerosotan nilai tukar perdagangan relatifnya;

*Keempat*, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Di satu pihak, mengalirnya surplus ekonomi dari Dunia Ketiga menyebabkan keterbelakangannya, sementara hal yang sama merupakan salah satu, jika bukan satu-satunya, faktor yang mendorong lajunya pembangunan di negara maju. Dengan kata lain, keterbelakangan di negara Dunia Ketiga dan pembangunan di negara sentral tidak lebih tidak kurang sebagai dua aspek dari satu proses akumulasi modal yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya polarisasi regional di dalam tatanan ekonomi dunia yang global ini.

*Kelima*, keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Bagi teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran mustahil terlaksana. Teori dependensi berkeyakinan bahwa pembangunan yang otonom dan berkelanjutan hampir dapat dikatakan tidak mungkin dalam situasi yang terus-menerus terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju.

### 3. Modal dan Kredit Dalam Pertanian

Setelah tanah, modal adalah nomor dua pentingnya dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi. Dalam arti kelangkaannya bahkan peranan faktor modal lebih menonjol lagi. Itulah sebabnya kadang-kadang orang mengatakan bahwa “modal” satu-satunya milik petani adalah tanah di samping tenaga kerjanya yang dinilai rendah. Pengertian modal di sini bukanlah dalam arti kiasan yaitu barang atau apa pun yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan. Tujuan petani dalam hal ini tidak lain adalah untuk mempertahankan hidupnya bersama keluarganya. Hidup petani bergantung pada pertanian, dan modalnya adalah tanahnya.

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu, dalam hal ini, hasil pertanian. Modal petani berupa barang di luar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak dan alat-alat pertanian lain, pupuk, bibit, hasil panen yang belum dijual, tanaman yang masih di sawah dan lain-lain. Dalam pengertian yang demikian tanah dapat dimasukkan pula sebagai modal. Bedanya adalah bahwa tanah tidak dibuat oleh manusia, tetapi diberikan oleh alam, sedangkan yang lain, seluruhnya dibuat oleh tangan manusia (Mubyarto, 1989:106).

Dalam membicarakan peranan modal dalam pertanian orang selalu sampai pada soal kredit, sehingga pengertian modal dan kredit dapat dikacaukan. Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian di samping tanah, tenaga kerja dan pengusaha, sedangkan kredit tidak lain adalah suatu alat untuk membantu penciptaan modal itu. Memang ada petani yang dapat memenuhi semua keperluan modalnya dari kekayaan yang dimilikinya. Bahkan petani kaya dapat meminjamkan modal kepada petani lain yang memerlukan. Tetapi secara ekonomi dapatlah dikatakan bahwa modal pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Dan modal yang berasal dari luar usaha tani ini biasanya merupakan kredit.

Dalam arti aslinya kredit adalah suatu transaksi antara dua pihak di mana pihak yang pertama disebut *kreditur* menyediakan sumber-sumber ekonomi berupa barang, jasa atau uang

dengan janji bahwa pihak kedua disebut *debitor* akan membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai *kreditor* adalah tengkulak, sedangkan sebagai *debitor* adalah para petani. Karena kredit merupakan alat untuk menciptakan modal maka jenis dan macam kredit dapat dibagi sesuai dengan jenis dan macam modal yang diperoleh dari kredit itu. Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang bersifat tetap yaitu barang yang tidak habis dalam suatu proses produksi. Misalnya tanah, ternak, mesin-mesin dan lain-lain. Kredit yang tidak untuk investasi disebut kredit modal kerja misalnya untuk membeli pupuk, bibit, pestisida atau untuk membayar upah tenaga kerja (Mubyarto, 1989:108-109).

Penelitian mendalam mengenai soal perkreditan pertanian dalam usaha intensifikasi pertanian padi sawah telah diadakan oleh Sudjanadi dalam Mubyarto (1989:114) antara tahun 1967-1968 di daerah Karawang dengan kesimpulan-kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit usaha tani dengan bunga yang ringan perlu untuk memungkinkan petani untuk melakukan inovasi-inovasi dalam usahatani.
- b. Kredit itu harus bersifat kredit dinamis yaitu mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti.
- c. Kredit yang diberikan selain merupakan bantuan modal juga merupakan perangsang untuk menerima petunjuk-petunjuk dan bersedia berpartisipasi dalam program peningkatan produksi.
- d. Kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada kredit usahatani yang langsung diberikan bagi produksi pertanian tetapi harus pula menyangkut kredit-kredit untuk kebutuhan rumahtangga (kredit konsumsi).

Sudjanadi dalam Mubyarto (1989:117) juga memberikan tiga syarat pemberian kredit konsumsi kepada petani sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau jasa yang diperoleh dengan kredit itu memang sungguh-sungguh diperlukan sekali.
- b. Tidak ada jalan lain yang lebih baik dan tidak dapat menunggu hingga penghasilan naik.
- c. Petani dapat mengembalikan kredit tersebut dengan cara yang tidak mengakibatkan kemerosotan taraf hidupnya.

Masalah perkreditan pertanian di negara kita masih merupakan masalah yang sulit. Suatu sistem kredit yang efisien harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai, tidak saja mengenai hubungan-hubungan sosial dan sikap serta pandangan hidup masyarakat petani setempat. Hanya dengan pengetahuan yang cukup mengenai ini semua maka kita akan dapat menempatkan persoalan-persoalan kredit yang dihadapi petani dalam proporsi yang wajar.

Bentuk-bentuk kredit perorangan yang masih banyak dipakai di dasa-desa di Indonesia (Mubyarto, 1989:118) pada dasarnya dapat dibagi menjadi:

- a. Kredit dengan jaminan tanaman
- b. Kredit dengan jaminan tanah (gadai tanah)
- c. Kredit uang atau barang yang dibayar kembali dengan uang atau barang tanpa jaminan.

Perhitungan bunga untuk kredit-kredit ini tidak mudah karena sangat banyak variasinya berhubungan dengan perbedaan macam tanaman dan adat kebiasaan setempat. Kredit yang jelas-jelas tidak memakai bunga misalnya, bila diteliti sebenarnya memakai bunga secara tersamar. Makin dekat masa panen tanaman yang bersangkutan (makin pendek masa pinjaman) makin besar tingkat keuntungan kreditor. Tingginya tingkat bunga pada kredit perorangan mudah difahami kalau diingat bahwa biasanya permintaan akan kredit jauh melebihi penawaran. Selain itu resikonya lebih besar dibanding kredit di luar pertanian. Kredit ijon misalnya tidak dapat dilepaskan dari resiko kegagalan panen, kerusakan karena hama dan penyakit, pencurian atau bencana alam.

#### **4. Hubungan *Patron-Client***

Tentang hubungan *patron client*, dalam bukunya yang berjudul “Penjaja dan Raja” suatu studi tentang perubahan sosial dan modernisasi ekonomi di dua kota di Indonesia yakni

Mojokuto dan Tabanan Bali, Clifford Geertz menyatakan bahwa salah satu *stereotype* keserjanaan yang paling kuat berakar, paling luas tersebar, tapi paling tidak benar mengenai organisasi sosial Indonesia, baik untuk Jawa maupun Bali sama salahnya; ialah bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri dari komuniti- komuniti petani yang hampir sepenuhnya mandiri dan tertutup, yang secara sosial terisolasi dan semua minat tertumpah pada kepentingan sendiri; komuniti petani ini secara pasif dan tawakal menderita di bawah telapak kaki kelas priyayi yang memerintah, yang juga merupakan golongan yang tersendiri dan tak mau campur dengan golongan lain – walaupun organisasi mereka tidak semantap komuniti petani itu.

Priyayi-priyayi Bali itu bukanlah “orang luar”, tetapi sejak dahulu merupakan bagian integral dari masyarakat Bali. Mereka itu bukan cuma penarik upeti saja, tetapi juga pelaksana fungsi-fungsi ekonomis, agama, politis, antardaerah, yang semuanya itu adalah fungsi yang sangat penting, tempat bersandar bagi kelangsungan kehidupan desa yang konon swasembada itu. Dan, jauh dari tida punya pengaruh esensiil atas struktur sosial pedesaan, mereka justru salah satu kekuatan utama yang menentukan bentuk akhir struktur itu. Walaupun rintangan kasta antara kaum aristokrat dengan orang kebanyakan hampir-hampir tak tertembus, adat sopan santun sudah sangat berkembang, dan garis pemisah antara kepentingan kedua lokal dan supralokal adalah sangat jelas, namun peranan kedua golongan itu di masyarakat Bali tradisionil lebih bersifat komplementer dari pada kontraditer; dan baik kerajaan Bali maupun desa Bali itu menjadi seperti apa adanya sebagian besar adalah akibat interaksi yang erat, multi-faset, berjangka panjang dan senantiasa berubah antara kedua golongan itu.

Jadi jelas bahwa “campur tangan” kasta atasan dalam soal-soal pertanian setempat bukan hanya terbatas bahwa pemungutan “upeti” belaka, tetapi juga memenuhi fungsi yang penting dan kadang-kadang bersifat inovatif.

## **5. Teori Pertukaran Sosial**

Untuk melihat hubungan sosial yang terjadi antara petani dengan tengkulak, penulis mencoba mengaitkannya dengan teori pertukaran sosial. Turner dalam Kamanto Sunarto (2004: 232) meringkas pokok pikiran teori pertukaran sebagai berikut:

- a. Manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain.
- b. Dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung rugi.
- c. Manusia cenderung menyadari adanya berbagai alternatif yang tersedia baginya.
- d. Manusia bersaing satu dengan yang lain.
- e. Hubungan pertukaran secara umum antar individu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial.
- f. Individu pun mempertukarkan berbagai komoditas tak terwujud seperti perasaan dan jasa.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Robert K. Yin, 1996:1).

Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh). Misalnya tentang perilaku, motivasi, tindakan dan sebagainya (Moleong, 2005:4-6). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena: *Pertama*, penelitian ini melihat individu secara holistik (utuh); *Kedua*, pendekatan ini mengutamakan latar alamiah, dengan maksud menggambarkan fenomena yang terjadi dengan

melibatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi dan lain-lain; dan *Ketiga*, pendekatan ini bersifat emik, peneliti dapat membangun pandangannya sendiri tentang apa yang diteliti secara rinci.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Jawa Tengah. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah: *Pertama*, Desa Siwatu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi perikanan yang baik dan mayoritas penduduknya adalah petani atau pembudidaya memiliki hubungan dengan tengkulak; *Kedua*, pertanian lele di Desa Siwatu masih dilakukan secara subsisten, hanya untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan petani, masih jauh dari pengelolaan industrial; *Ketiga*, pengelolaan seperti ini, mengingat petani mengalami keterbatasan modal dan satu-satunya lembaga kredit yang mengisi kebutuhan petani tersebut adalah lembaga kredit tradisional bernama tengkulak. Keberadaan tengkulak tersebut, seringkali dibarengi dengan sistem ijon; dan Keempat, adanya akses peneliti untuk mencapai lokasi tersebut.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode tertentu untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data tergantung karakteristik data, maka metode yang digunakan tidak selalu sama dengan informan (Gulo, 110-115:2002). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui *field research*, di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara secara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data teoritis, asas-asas, konsepsi, pandangan dan tema-tema. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, tulisan, majalah dan catatan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

## **D. Hasil Penelitian**

### **1. Terjadinya Relasi Patron-Klien dalam Budidaya Lele**

Relasi patron-klien menurut Scoott dalam Putra (1988:3-4), terjadi karena: *Pertama*, adanya ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran; *Kedua*, adanya tatap muka (*face to face character*); dan *ketiga*, mempunyai sifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*).

Bila menilik dari ketiga karakteristik hubungan patronase tersebut, ketiga karakter terlihat dalam hubungan antara tengkulak dengan pembudidaya lele. Pada karakteristik *Pertama*, petani lele yang tergabung dalam Pokdakan Lele “Karya Mulia”, hanya sedikit yang mempunyai kecukupan modal. Modal yang dibutuhkan dalam budidaya lele sangat besar. Setiap pemeliharaan per 10.000 ekor lele, setidaknya membutuhkan modal sebesar Rp. 11 juta rupiah. Modal yang dimaksud di sini adalah modal bergerak/berputar, yang terdiri dari biaya bibit, pakan, air dan obat-obatan. Dari keempat biaya modal tersebut, pakanlah yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Budidaya 10.000 ekor lele membutuhkan pakan ikan (*poor*) sekitar Rp. 10 juta rupiah selama 2-3 bulan.

Angka sebesar ini tidak dapat dipenuhi oleh kebanyakan petani, yang rata-rata mengalami masalah keterbatasan modal. Dari ke-18 petani, hanya 2 orang saja yang dianggap mempunyai kecukupan modal. Namun bila ditelusuri lebih jauh kedua orang tersebut harus mengurus tabungan atau meminjam dari sanak saudaranya terlebih dahulu. Berdasarkan fakta di lapangan tersebut, jelas budidaya lele membutuhkan biaya yang sangat besar.

Ketika petani sudah kehabisan modal, mereka langsung menghubungi tengkulak untuk mengatasi masalah permodalan ini. Imbalannya tentu saja, lele hasil panen petani akan dipanen oleh tengkulak dengan harga dan waktu panen yang ditentukan tengkulak. Inilah mengapa posisi patron (pe....) dipegang oleh Tengkulak.

Dengan ditentukannya harga oleh tengkulak, berpotensi merugikan petani. Tengkulak pada umumnya menentukan harga di bawah harga pasar. Harga lele di 3 pasar di Batang



(Pasar Siwatu, Pasar Wonotunggal dan Pasar Batang), saat ini (September 2015) mencapai harga Rp. 23.000,- per Kg-nya. Namun oleh tengkulak, harga lele di tingkat petani bisa ditekan semaksimal mungkin. Bila harga lele di tingkat petani rata-rata Rp. 18.000,- per Kg, maka lele milik petani yang menjadi patron tengkulak hanya dihargai maksimal Rp.14.000,- per Kg.

Perbedaan harga ini tentunya sangat merugikan petani. Bila lele budidayanya sanggup menghasilkan panen 1 ton, maka seharusnya ia akan mendapatkan penghasilan setidaknya Rp. 18 juta rupiah (kotor). Penghasilan bersih budidayanya selama 3 (tiga) bulan, bisa mencapai 8 juta rupiah. Lain halnya jika berhutang pada tengkulak, penghasilan maksimalnya hanya Rp. 4 juta rupiah.

Perbedaan masa panen, juga bisa sangat merugikan petani. Petani akan dapat memaksimalkan keuntungan budidayanya jika menghasilkan lele dengan ukuran 8-10 ekor per Kg-nya dan ukuran tersebut dapat dicapai dalam 3-4 kali panen, selama 3- 3,5 bulan. Namun bila terjerat hutang tengkulak, masa budidaya ini bisa menjadi lebih singkat. Rata-rata terjadap petani yang terjerat hutang dengan tengkulak, tengkulak memanen lele mereka ketika berumur 2,5 bulan budidaya (itupun dalam 1 kali panen). Dipangkasnya masa panen ini, tentu menghalangi petani untuk memaksimalkan budidayanya, sehingga akibatnya, hasil panen akan merosot jauh dari harapan normalnya.

Melihat paparan di atas, membuktikan bahwa budidaya lele yang selama ini diusahakan petani dan tadinya diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan petani, menjadi terhalang dari tujuannya. Budidaya akhirnya hanya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keuntungan dan kepentingan pemilik modal (tengkulak). Sedangkan buat petani keuntungan yang ada hanya cukup agar budidayanya tidak merugi atau bahkan gulung tikar.

Karakteristik Kedua, adalah tatap muka. Mengingat tengkulak merupakan lembaga keuangan yang masih bersifat tradisional, maka pertemuan antara patron-klien berlangsung secara tatap muka. Relasi seperti ini di dunia sosial, masih sangat efektif dalam mengikat petani untuk tunduk dan patuh pada keinginan tengkulak. Kepatuhan dan ketundukan ini merupakan balas jasa atas bantuan yang tengkulak berikan pada mereka.

Sedang yang Ketiga, luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Hutang yang diberikan tengkulak pada petani tidak cuma-cuma atau dibayar seharga hutang yang diberikan. Namun hutang tersebut berarti kepemilikan asset sumber daya tengkulak yang dititipkan pada petani. Hutang modal, tidaklah cukup dibayar dengan nominal yang sama, melainkan juga harus dibayar berikut keuntungan yang nanti akan diperoleh. Akhirnya hutang petani ini nantinya berkembang dan meluas menjadi asset dan keuntungannya menjadi milik tengkulak. Sebagai majikan, tentu saja petani harus mengikuti kemauan tengkulak. Namun demikian, unsur kekeluargaan dan kecenderungan untuk saling tolong menolong, membuat masing-masing pihak saling menjaga kepercayaan.

Tengkulak bisa saja terpaksa tidak menagih hutangnya pada petani, karena mereka gagal panen atau tengkulak sedang membutuhkan biaya, sehingga ia menarik seluruh sumber daya yang diberikan petani. Di sini lah unsur fleksibilitas relasi patron-klien ini berjalan. Fleksibilitas juga terlihat dari mekanisme yang cepat dan praktis dalam memperoleh pinjaman. Petani ketika membutuhkan modal, ia bisa langsung mengontak tengkulak untuk mendapatkan pinjaman. Mekanisme seperti ini tidak membutuhkan perjanjian tertulis atau berbagai formalitas lainnya seperti yang disyaratkan lembaga keuangan modern seperti bank.

Keberadaan lembaga tengkulak memang sudah menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Ketiadaan modal dalam budidaya menjadi penyebab terjadinya hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak, dan ini sudah mentradisi dalam kultur budaya pertanian, termasuk budidaya lele di Batang Jawa Tengah. Bila dalam suatu wilayah, ditemukan potensi pertanian yang cukup menjanjikan, namun petaninya mengalami masalah permodalan, bisa dipastikan akan ada relasi patron klien. Hal tersebut juga berlaku dalam bisnis budidaya lele.

## 2. Daya Ikat Tengkulak terhadap Petani Lele

Bila menilik pendapat Turner dalam Kamanto Sunarto (2004: 232) tentang teori pertukaran, jelas sekali bantuan yang diberikan tengkulak kepada petani tidak untuk kepentingan petani, melainkan tengkulak pasti mempunyai motif dan tujuan. Motif ini didasarkan pada upaya untuk meraih keuntungan dari bantuan yang diberikan. Dengan memberikan hutang kepada petani, maka tengkulak akan memiliki asset berupa ketersediaan barang komoditas usahanya dan sekaligus pengambilalihan manajerial budidaya dari petani kepada dirinya.

Dalam dunia perdagangan, penguasaan asset produksi ini sangat diperlukan dalam dunia persaingan usaha. Jika tengkulak tersebut adalah pemain pasar, tentu ia memperhitungkan kekuatan kompetitornya, sekaligus menjaga kapasitas kekuatan usahanya agar tetap kompetitif. Artinya, bagi tengkulak kekuatan pasar menjadi tidak berarti jika ia tidak mempunyai barang. Oleh karena itu kekuatan modal yang adanya, harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk penguasaan faktor produksi.

Cara yang lazim digunakan oleh tengkulak lele di Batang adalah, mereka tidak menunggu petani menghubungi dirinya ketika panen, melainkan menawarkan secara aktif bantuan modalnya ke petani. Hal tersebut mereka lakukan dalam rangka penguasaan faktor produksi agar mampu bersaing dengan tengkulak-tengkulak lainnya. Oleh karena itu tidak heran bila para tengkulak berlomba untuk menanamkan akar jejaring modalnya ke petani. Semua itu mereka lakukan demi menjamin penguasaan mereka akan ketersediaan barang sebagai komoditas perdagangan. Mudah-mudahan, tengkulak akan kesulitan mendapatkan stok lele yang ia salurkan ke pasar, jika sejak awal tidak memprospek petani lele menjadi petaninya. Proses konversi petani yang bebas dan mandiri, menjadi petani yang tunduk patuh pada kemauan tengkulak inilah kondisi yang diidealkan oleh tengkulak. Ketundukan ini baru ia dapatkan ketika ia mampu dan telah membiayai kebutuhan produksi petani.

Untuk mendapatkan ketundukan petani – terutama di desa – masih sangat mudah. Petani dalam proses produksinya, mempunyai budaya ketergantungan dan mereka sangat terbiasa dengan budaya ini. Dalam budaya masyarakat Desa Siwatu – Wonotunggal – Batang, agar tetap bisa eksis, Si Miskin harus mengabdikan pada Si Kaya. Eksistensi diri bagi petani adalah mereka bisa bertahan hidup dan mengatasi seluruh biaya-biaya yang ada, baik biaya hidup maupun biaya produksi (budidaya). Ketiadaan modal, tentu akan menghambat kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, untuk mampu bertahan hidup (*survive*) mereka membutuhkan modal yang ia dapat dari Si Kaya. Sebagai gantinya, ia akan mengikuti kemauan Si Kaya.

Melihat peluang ini, tengkulak sebagai Si Kaya, tidak segan-segan menggelontorkan sebagian modalnya kepada petani miskin untuk mendapatkan kekuasaan atas faktor produksi yang ada pada petani. Kepatuhan petani kepada tengkulak berlangsung otomatis, meski tanpa jaminan atau perjanjian tertulis. Hal ini dikarenakan petani dalam kondisi mengalami ketergantungan akan modal.

Bila di lihat dari kaca mata hukum, jelas bahwa ikatan perjanjian antar petani dan tengkulak sangat lemah. Hal ini dikarenakan ketiadaan bukti tertulis atas perjanjian tersebut. Ketiadaan bukti tertulis, ini memungkinkan salah satu pihak ingkar atas perjanjian yang dibuatnya, apalagi perjanjian ini tidak diikuti dengan adanya jaminan. Faktor-faktor inilah sebetulnya yang menyebabkan hak kreditur tidak terlindungi oleh hukum. Meskipun demikian, budaya kredit tradisional (kredit rente dan ijon) masih tetap berlangsung dalam masyarakat. Tengkulak tidak menjadikan masalah hukum ini sebagai pertimbangan utama dalam menyalurkan kreditnya ke masyarakat.

Bagi tengkulak, yang penting petani terikat untuk tunduk patuh pada keinginan mereka. Meski hukum tidak melindunginya, kenyataannya ikatan ini telah memperoleh legitimasi sosial dan budaya. Secara sosial, petani miskin mengalami ketergantungan modal terhadap si kaya (tengkulak) berikut dengan segala kemudahan aksesnya. Jika ia wanprestasi

(tidak membayar), maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Ia tidak akan memperoleh kepercayaan lagi dari tengkulak, mengingat nama baiknya sudah tercemar di masyarakat. Lagi pula, praktik perjanjian dan ketergantungan ini sudah terpolakan menjadi kebiasaan dalam masyarakat (membudaya). Hal inilah faktor utama yang menyebabkan lembaga tengkulak, kredit rente, maupun sistem ijon, masih tumbuh subur dalam kehidupan budidaya pertanian.

#### **E. Simpulan**

Dalam perdagangan komoditas lele, pada level produksi terlihat adanya hubungan patron-klien yang mencolok antara petani pembudidaya lele dengan tengkulak. Kemunculan relasi ini dipicu ketidaktersediaan modal yang dimiliki petani dalam memenuhi kebutuhan produksinya, terutama dalam hal pakan ikan (*poor*). Untuk bisa mendapatkan keuntungan Rp. 8 juta, petani harus menyediakan dana Rp. 11 juta dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (satu kali putaran budidaya). Dana sebesar itu pada umumnya tidak dimiliki petani. Untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi tersebut mereka meminta bantuan tengkulak. Sebagai imbalannya, mereka harus mengikuti keinginan tengkulak, termasuk menurunkan harga jualnya, atau bahkan melakukan panen dini atas budidaya lele. Tak heran apabila penghasilan mereka dari budidaya lele hanya dapat menghasilkan angka maksimal 50% dari keuntungan normal. Dari angka ini sangat rentan untuk menurun lagi penghasilannya, hingga mencapai 20% jika tengkulak semakin menekan harga, dan mempercepat masa budidaya.

Nyatanya keberadaan relasi patron-klien ini tidak membantu upaya kesejahteraan ekonomi petani lele, melainkan hanya agar budidaya lele tetap lestari, selestari kesetiaan dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tengkulak.

Relasi patron-klien antara petani pembudidaya lele dengan tengkulak ini telah lama berlangsung. Tidak ada perjanjian tertulis yang menyebabkan hubungan ini terjadi, alih-alih ada jaminannya. Dari kaca mata hukum, perjanjian ini sangat rapuh. Petani bisa menyangkal adanya peminjaman tersebut dan melakukan wanprestasi. Namun karena relasi ini mempunyai legitimasi sosial dan kultural, tengkulak merasa terlindungi dan aman menginvestasikan dananya ke petani pembudidaya. Meski tanpa perlindungan hukum yang memadai, daya ikat sosial dan kultural terbukti sangat ampuh dalam memaksakan kepatuhan petani (sebagai klien) kepada tengkulak (sebagai patron/majikan). Daya ikat sosial dan kultural tersebut berupa budaya ketergantungan petani dan kepercayaan sosial.

#### **Daftar Pustaka**

- Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. LP3S. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Soekartawi. 1993. *Prinsip Dasar Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Rajawali Perss, Jakarta.
- Sudiyono, A. 2001. *Pemasaran Pertanian*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.